

Yang Penting Horeg!: Sound Horeg dan Klaim atas Ruang Kuasa Pedesaan

¹F.A. Nurdiyanto, ²Ahmad Yusrifan Amrullah,
³Kristoforus Lintang Mahadewa

¹Center for Restoration & Regeneration Studies

^{1,2,3}Center for Indigenous & Cultural Psychology

Email: franznur@gmail.com

Abstract

This article explores the sound *horeg* festival as both an instrument and an arena of power contestation in rural Javanese life. Employing ethnography, this study reveals that this explosive sonic celebration goes beyond entertainment and serves as a symbolic interlude through which smallholder farmers momentarily step out of their subordinated positions within the village's power structure. By taking on the roles of committee members, operators, or sound *horeg* performers, smallholder farmers temporarily regain the ability to organize, command, and set rules. However, this seizing of power is deeply ambivalent. Rather than opening a space of liberation, sound *horeg* practices reproduce the very hierarchies villagers encounter in everyday life: whoever holds the microphone, controls the electrical cables, or manages the stage setup quickly becomes entangled in familiar logics of extraction, exclusion, and domination. The findings also reveal a fundamental paradox, a festival celebrated as an escape from structural pressures becomes a sonic portrait of power itself: loud, intoxicating, and slippery to grasp. The thundering bass of sound *horeg* operates as a subtle form of sabotage against a world that has long muted their cries; yet, such "resistance" stalls at euphoria, lacking a class orientation or any trajectory toward social change. Ultimately, sound *horeg* functions as a release valve that channels structural wounds into entertainment, while simultaneously sustaining and reproducing a mode of power that is boastful, noisy, and unrelentingly performative

Keywords: *Rural, power, resistance, festival, sound horeg*

Abstrak

Artikel ini menelaah festival *sound horeg* sebagai instrumen sekaligus arena perebutan kuasa dalam kehidupan pedesaan Jawa. Melalui etnografi, penelitian ini melihat bahwa pesta gelegar tersebut melampaui domain hiburan, menempatkannya sebagai jeda simbolik bagi petani kecil untuk keluar dari posisi subordinat dalam struktur kuasa pedesaan. Melalui peran sebagai panitia, operator, atau pemain festival, petani kecil merasakan kembali kemampuan untuk mengatur, memerintah, dan menentukan aturan. Namun, pemulihan kuasa ini bersifat ambivalen. Alih-alih membuka ruang

pembebasan, praktik *sound horeg* justru mereproduksi pola hierarki yang mereka alami sehari-hari: siapa yang memegang mikrofon, menguasai kabel listrik, atau mengatur tata panggung; dengan cepat kembali terjebak dalam logika memungut, meminggirkan, dan mendominasi. Temuan ini juga mengungkap paradoks yang mendasar bahwa festival yang dirayakan sebagai ruang pelarian dari tekanan struktural justru menggambarkan wataknya sebagai kekuasaan yang bisings, memabukkan, dan licin untuk ditangkap. Dentuman *sound horeg* berfungsi sebagai bentuk sabotase halus terhadap dunia yang telah lama membisukan jeritan mereka, tetapi “perlawanan” tersebut terhenti pada euforia tanpa orientasi kelas atau nada perubahan sosial. *Sound horeg* menjadi katup pelepas frustrasi yang menyalurkan luka struktural ke ranah hiburan, sembari mempertahankan watak dan reproduksi kuasa yang penuh bualan serta bisings.

Kata Kunci: *Kuasa, pedesaan, resistensi, festival, sound horeg*

Pendahuluan

Di kaki Gunung Wilis, ritme kehidupan petani atau *wong cilik*¹ di pedesaan kini tidak lagi semata ditentukan oleh siklus tanam-panen ataupun *pranata mangsa*. Interupsi kapitalisme telah menata ulang prioritas mereka; mulai dari kewajiban membayar *paylater* (cicilan), membiayai hajatan untuk menjaga citra sosial, hingga tingginya biaya produksi pertanian untuk mengikuti tren komoditas pasar. Realita ini telah membentuk wajah kehidupan pedesaan sehari-hari yang ditata ulang oleh nalar ekonomi. Dari nalar tersebut, tercipta arena baru dengan kekuasaan yang tidak lagi hanya milik mereka yang berstatus tradisional, tetapi juga diperebutkan melalui modal ekonomi dan sosial. Hal tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan kekuasaan pedesaan yang membentuk nalar ekonomi (Semedi 2020).

Artikel ini membahas dinamika kuasa pedesaan melalui festival *sound horeg*. Dalam konteks pedesaan di Jawa Timur, kekuasaan memiliki dua wajah yang saling bersaing sekaligus melengkapi (Ayuningtyas 2025; Chalik 2016; Pradana 2019). Di satu sisi, ia melekat pada figur-figur “tradisional” seperti kiai-pesantren, sesepuh desa, dan dinasti politik desa (Pradana 2019). Mereka telah lama menggenggam jenama simbolik dan kultural yang dapat digunakan untuk memperkokoh pengaruh dan kekuasaan. Namun, di tengah janji kemeriahan ekonomi neoliberal, kekuasaan tersebut tidak lagi menjadi monopoli figur tradisional. Kuasa di sisi lain dipertarungkan oleh pemilik modal sosial-ekonomi, misalnya yang mampu menyelenggarakan hajatan besar, mendatangkan hiburan bermalam-malam, atau menjalin relasi dengan sponsor dan jaringan politik di perkotaan. Bagi petani, bentuk semacam ini adalah panggung baru untuk mencecap manisnya kekuasaan, menjadi cara untuk memastikan mobilitas sosial, memperluas jaringan ekonomi, dan meneguhkan posisi dalam struktur komunitas yang terus berputar. Melalui arena non-tradisional, mereka mengakses rute untuk bertaji dan memosisikan ulang kedudukan agar diakui dalam suatu komunitas, mengikuti nalar *if you can't beat them, join them*.

1 Secara harfiah berarti ‘orang kecil’, merujuk pada kekerdilan kuasa dan sumber daya.

Semula, kami mengamati bahwa festival *sound horeg* dimaksudkan sebagai bagian dari perayaan meriah hari ulang tahun desa. Kami menafsirkan festival ini sebagai arena perebutan kekuasaan oleh wong cilik yang tidak kalah seru dari pemilihan kepala desa. Semedi (2020) mengungkapkan bahwa petani mengembangkan resistensi yang halus untuk melawan tekanan kekuasaan dan memanfaatkan struktur sosial untuk membonceng gerak mobilitas sosial. Sebagai arena kuasa, festival *sound horeg* tidak bisa dilepaskan dari nalar kapitalisme yang kini telah menata ulang kehidupan pedesaan. Melalui festival *sound horeg*, kuasa dan pengaruh itu ditata ulang, direproduksi, bahkan dipertunjukkan. Biaya produksi, peran sponsor, dan kemampuan menyewa *sound system* terbaik menjadi atribut kuasa baru yang bahkan suaranya dapat meng-*horeg*-kan otoritas tradisional dalam mengendalikan kanal kuasa di Jawa Timur. Festival ini juga telah menjadi ajang arena kekuatan ekonomi yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah kuasa simbolik. Di tengah ke-*horeg*-annya, festival ini adalah cerminan dari cara nalar ekonomi membentuk imajinasi kolektif tentang makna kekuasaan sebagai hal yang gayeng dan meriah.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan studi etnografi yang dilakukan pada pertengahan tahun 2025 di Kabupaten Malang. Analisis data difokuskan pada bagaimana festival *sound horeg* diperlakukan sebagai arena kekuasaan oleh wong cilik. Observasi partisipatif, termasuk wawancara, dilakukan dengan menyertai keseharian warga Untung, mengikuti persiapan *sound horeg*, mengamati gerak ekonomi di sawah, kandang sapi, sampai ke pasar sayur yang menjadi ruang penting dalam pembentukan wacana lokal. Pengamatan berfokus pada bagaimana *sound horeg* dibicarakan, dipikirkan, dan dijalankan; mulai dari proses pembentukan “omong-omong” akan adanya festival *sound horeg*, pembentukan panitia, penarikan iuran, sampai pascafestival. Seluruh nama informan dan lokasi penelitian, kecuali kabupaten, adalah pseudonim.

Petani, Peternak, dan Manol

Penghidupan masyarakat Untung (kecamatan samaran lokasi kerja lapangan) dominan bertopang pada olah lahan. Selain menanam komoditas sayuran, yang bukan sebagai kudapan hariannya, mereka juga menanam rumput gajah ataupun jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Sekilas, perekonomian desa ini tampak makmur dan stabil: hamparan ladang hijau, sapi perah hampir di setiap rumah, serta aktivitas pasar yang menggeliat ramai setiap pagi. Namun, di balik wajah *gemah ripah* itu, ekonomi lokal diatur oleh logika eksploitatif yang menjerat. Di bagian ini, kami hendak menunjukkan bahwa apa yang terlihat sebagai kerja keras dan kemandirian petani sebenarnya berjalan di bawah bayang-bayang sistem ekonomi yang “omong kosong.” Sumber daya petani diperas, menanggung risiko yang diciptakan struktur ekonomi dan tidak bisa mereka kendalikan. Selain itu, mereka tidak punya nyali di hadapan harga pasar yang rendah, ditekan tengkulak, dikontrol koperasi, dan dikibuli oleh janji-janji kemakmuran.

Gambar 1. Keseharian wong cilik di Desa Untung yang kontras dengan gemerlap *sound horeg*. Di kiri, sebuah sepeda motor yang kelebihan muatan membawa hasil panen menuju pasar sayur, menunjukkan kerja rapuh yang menopang ekonomi desa. Di kanan, seorang petani menyiangi tanah kering dengan alat sederhana, menggambarkan rutinitas fisik yang terus menghidupi keluarga. Aktivitas-aktivitas inilah yang menjadi fondasi ekonomi desa, tetapi sering tenggelam di balik dentuman pesta *sound horeg* yang seolah menawarkan kemeriahan dan kuasa sesaat.



Sebagian besar warga Untung masih menggantungkan hidup pada lahan peninggalan keluarga yang semakin lama semakin menyempit. Kebanyakan tanah telah disulam oleh komoditas seperti sawi, tomat, kol, wortel, apel, hingga labu siam *gondes*. Ironisnya, pertanian itu mereka rawat dengan tenaga gratis dan biaya obat-obatan yang selalu meningkat tajam. Sayur mayur di Untung tidak lagi dimanfaatkan untuk memenuhi serat nutrisi harian, tetapi sebagai perjudian keuntungan dengan ancaman harga pupuk yang kian melonjak, cuaca yang tidak lagi bisa diprediksi oleh *pranata mangsa*, dan permainan harga yang membuat setiap panen seperti lotre. Kalah dalam taruhan berarti pindah peran dengan menggadaikan tenaganya pada lahan milik orang lain. Kehidupan mereka tidak pernah terjamin. Anekdote “ngebut seperti sopir lombok” menyuguhkan keseharian yang pahit tentang harga panen cabai yang menggiurkan, namun setibanya di pasar harga anjlok tidak keruan.

Selain pertanian sayur, peternakan sapi perah adalah wajah ekonomi warga Untung. Dua kali dalam sehari, pagi dan sore, pemilik sapi berjongkok dan memerah susu. Bunyi benturan ember susu *tang-ting-tang-ting* menjadi penanda “produktivitas” peternakan. Harga susu sudah ditentukan oleh koperasi, yaitu berkisar Rp5.000 hingga Rp7.000 per liter, tergantung pada kualitas yang tidak sepenuhnya mereka pahami ukurannya. Pendapatan susu diberikan setiap dua minggu, setelah dikurangi konsentrat pakan ternak sejumlah Rp800.000-Rp1.600.000. Harga tersebut belum terhitung dengan biaya pembelian rumput kаланjana dari sawah-sawah tetangga apabila mereka tidak memiliki lahan untuk memanen rumput sendiri. Bila membeli tebon, mereka memerlukan Rp100.000 setiap harinya untuk tiap empat ekor sapi. Meskipun demikian, koperasi seolah menjadi oasis di Kecamatan Untung: memiliki aset tanah, kandang dengan ratusan sapi perah, kafe, dan segala hal yang tampak mendukung kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga menyediakan dokter hewan secara cuma-cuma untuk pemeriksaan sapi anggota dan menyediakan simpan pinjam manakala sapi sedang krisis produksi susu.

Gambar 2. Seorang peternak pemerah sapi di kandang kecil miliknya, aktivitas rutin yang dilakukan dua kali sehari (pagi dan sore) untuk memenuhi setoran susu ke koperasi. Kegiatan ini mencerminkan keseharian wong cilik di Desa Untung yang bergantung pada kerja-kerja fisik dan ritme alam, jauh dari gemerlap dentuman *sound horeg* yang kelak mendominasi ruang sosial desa.



Mereka yang tidak memiliki lahan bekerja sebagai buruh tani dengan upah Rp50.000-Rp75.000 perhari. Kebanyakan pemuda memilih menjadi *manol*², manifestasi konkret dari sistem ekonomi yang eksploitatif di Untung. Dengan motor pribadi yang telah dimodifikasi, mereka mengangkut panen dari kebun ke pasar sayur atau pangkalan tengkulak dengan jarak tempuh 5-10 km di jalanan persawahan berbatu dan aspal yang sempit. Upah rata-rata mereka dalam *sakpotong*, 2-3 karung sayur, sebesar Rp50.000-Rp80.000. Dalam sehari, mereka bisa menerima upah sekitar Rp200.000 dengan tiga kali mengangkut sayur. Dengan hitungan 20 hari kerja, mereka bisa mendapatkan Rp4.000.000 dalam sebulan. Namun, upah ini tidak bisa dipertimbangkan melebihi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malang³ karena *manol* menanggung setiap ongkos: bensin, kerusakan dan depresiasi kendaraan, serta risiko kecelakaan. Selain itu, tidak ada jaminan sosial ataupun kesehatan yang diterima. *Manol* adalah figur yang diciptakan oleh sistem neoliberal di pedesaan, sebagaimana *ojol* (*ojek online*) di perkotaan, mendorong setiap orang bekerja keras sembari memikul seluruh risiko di atas bahu sendiri.

Petani, peternak, dan *manol* berada dalam “geng pukul yang babak belur” oleh nalar ekonomi pedesaan saat ini. Di samping beragam ketidakpastian tersebut, kami mengamati bahwa kemunculan *sound horeg* memiliki keterkaitan dengan relasi ekonomi. Dentuman *horeg* seolah-olah hadir sebagai hiburan, padahal frekuensinya adalah kanal simbolik bagi mereka yang hidup dalam serba kalah. Di tengah ritme ekonomi yang menjerat, *sound horeg* menjadi ruang warga untuk menguasai sesuatu, meski rangkaiannya hanya semalaman. Mereka yang terlibat di dalamnya dapat merasakan sensasi kuasa, ilusi kebersamaan, dan jeda dari rutinitas yang mengekang. Dalam dunia yang mengurus tubuh melalui sistem ekonomi *kerja, kerja, dan kerja*, *sound horeg* menawarkan pelarian dengan bebunyian yang memekakan dan selebrasi lirih atas keberlanjutan hidup di tengah kekalahan.

2 Pekerja harian lepas yang biasanya bekerja di bawah tengkulak.

3 UMK Kabupaten Malang tahun 2025 sebesar Rp3.553.530.

Persiapan (katanya) Pesta!

Hiburan selalu dimaknai sebagai ruang pernapasan, kesempatan *healing* bagi tubuh-tubuh yang letih bekerja. Ia menjadi jeda di antara hari-hari panjang bercocok tanam, berdagang, atau mengurus ternak. Sebagai hiburan pula, *sound horeg* hadir menjadi momen katarsis-terapeutik, tempat tawa, musik, dan gerak tubuh menjadi pelipur. Dalam lanskap pengertian semacam ini, *sound horeg* tampil bukan sekadar tontonan, melainkan bentuk bersama dari katarsis-somatik dan uap kolektif (*collective efervescence*) untuk beristirahat, merayakan diri, dan menyingkirkan kecemasan terhadap gagal panen atau impitan utang.

Gambar 3. Ilustrasi suasana rapat persiapan menjelang gelaran *sound horeg*: para lelaki duduk melingkar, membahas iuran, vendor, hingga logistik acara. Rapat-rapat seperti ini menjadi panggung awal munculnya struktur kuasa baru di tingkat lokal, ketika keputusan, suara, dan kemampuan mendikte arah pembahasan menjadi modal performatif bagi mereka yang ingin tampil sebagai aktor penting dalam pesta *horeg*



Ilustrasi: Matilda KD (@tildasmisul di Instagram)

Sound horeg memperlihatkan dirinya sebagai sesuatu yang melampaui hiburan. Di balik dentuman bas, terdapat mekanisme sosial yang kompleks: serangkaian rapat, pungutan iuran, dan perdebatan panjang antarwarga. Tidak semua warga dapat terhibur oleh hiburan yang mereka biayai sendiri; sebagian merasa keberatan, sebagian memilih diam, dan sebagian lagi menjadikannya sebagai kesempatan untuk menegosiasikan posisi. Dari kepanitiaan yang dibentuk, muncul struktur kuasa baru di tingkat lokal: penarik iuran, pengatur parkir, koordinator konsumsi, hingga juru bicara yang menentukan vendor dan artis biduan yang diundang. Di tangan mereka, *sound horeg* menjelma menjadi arena kuasa temporer yang menghasilkan ketegangan dan hierarki baru dalam kehidupan sosial.

Dalam suasana yang tampak sederhana itu, mereka (dalam rupa panitia) sesungguhnya sedang menegosiasikan kekalahan mereka sendiri. Mereka yang kalah dalam pertarungan ekonomi, kini berupaya memperoleh kemenangan kecil: dalam bentuk suara, keputusan, atau bahkan iuran. “*Sound horeg* kita tahun ini jangan sampai kalah dengan tetangga. Kemarin mereka sudah undang 15,” seru Suradi memancing emosi dan semangat majelis; memulai perdebatan mengenai segala aspek *sound horeg*. Rapat ini menjadi begitu panas karena mengawali permasalahan iuran yang akan menghantui warga dan panitia satu tahun ke depan. Rapat justru menampilkan janji-janji solidaritas dan guyub warga yang gagal tercapai. Terlihat jelas upaya-upaya pembangkangan. Beberapa elite kampung yang kontra sudah tidak berkutik untuk melawan rencana penyelenggaraan *sound horeg*. Mereka

takut mengutarakan keberatan dan melawan dengan diam. Mereka hanya bisa mengeluh saat pulang dari rapat, “Saya tidak suka *sound horeg*, tapi mau bagaimana lagi?” Rapat itu menjanjikan *sound horeg* akan dihelat tahun depan dan segenap panitia yang ditunjuk telah memulai kerja penyambutan untuk satu tahun. Persiapan *sound horeg* yang tampak guyub itu sebenarnya adalah panggung politik kecil, siapa yang lebih lantang bersuara, dia yang menentukan arah. Di arena itu, kuasa beredar dan bergeser dengan leluasa.

Keputusan telah diambil dan pendanaan *sound horeg* akan ditanggung oleh seluruh warga selama setahun. Iuran dibayarkan setiap dua minggu, usai mencairkan “uang susu” di koperasi. “Yang berkecukupan perlu diminta iuran lebih, sementara yang berkekurangan iuran bisa dikurangi,” demikianlah perintah rapat, dan muda-mudi menjalankan peran debt collector menarik iuran dari rumah ke rumah. Mereka sudah hafal rumah tangga mana yang bisa dipatok iuran lebih tinggi dan mana yang tidak memiliki harta apapun. Rumah tangga bersapi banyak kerap menjadi sasaran pemberian proposal sponsor sekaligus ujung tombok untuk menambah uang cadangan. Kami bahkan mendengar dari panitia bahwa beberapa pengusaha olahan susu di Kecamatan Untung sedikitnya bisa menerima lima proposal dari beberapa penyelenggara (minimal Rp3.000.000 untuk satu proposal). Di sisi lain, rumah tangga yang memiliki sedikit sapi juga frustrasi menghadapi iuran,

“Rumah kami ditarik iuran Rp1.500.000. Bisa sebanyak itu karena panitia menghitung jumlah orang dewasa di dalamnya. Satu orang dewasa perlu bayar Rp500.000” ujar Sandi.

Iuran yang tidak imbang antara orang kaya dengan orang melarat ini hanyalah secuil cara untuk menindas “orang kaya” di kampung.

Semangat guyub yang dicita-citakan dalam festival nyatanya tidak sepenuhnya tampak. Ketegangan mulai muncul ketika tagihan tidak kunjung lunas. Bagian *fundraising* berinisiatif untuk memasang spanduk berisi daftar warga yang belum melunasi iuran di beberapa sudut kampung RT 07. Spanduk tersebut hanya terpasang dua hari karena diprotes banyak orang. Pemasangan spanduk menjadi cara untuk mengkategorisasikan siapa yang “patuh” dan siapa yang “membangkang”. Dalam ruang sosial yang menggunakan kata guyub, rasa malu dipakai sebagai alat penertiban yang diukur dari kemampuan membayar iuran dan tepat waktu. Apakah dengan ini masih bisa dikatakan guyub?

Pesta Digelar

Dalam konstelasi *sound horeg*, kuasa bukan sebatas hadir dalam bentuk perintah atau dominasi, melainkan performatif: diperankan, diperagakan, dan dipertontonkan. Kuasa bekerja melalui panggung, atribut, suara, dan tata peran yang menjadikan setiap orang menjadi aktor dalam festival ini. Ketika *sound system* sudah disusun dalam kapasitas tertentu, maka atraksi yang sebenarnya baru dimulai. Manol, dalam perayaan ini menjadi panitia, merepresentasikan simbol kuasa di tengah dipertunjukkan. Mereka yang mengenakan *lanyard* panitia, memegang mikrofon, pemain dengan kostumnya, dan mereka yang duduk di sofa kehormatan adalah aktor krusial dalam pesta kekuasaan ini.

Gambar 4. Panggung *sound horeg* dengan sorotan lampu warna-warni yang menandai dimulainya “pesta kuasa” wong cilik. Susunan speaker menjulang, efek cahaya menari di udara, dan dentuman bass mengisi ruang desa. Gemerlap ini menunjukkan bagaimana suara, cahaya, dan tubuh dipadukan untuk menciptakan ilusi kebesaran; sebuah estetika yang memukau sekaligus menutupi kerentanan ekonomi yang mendasari penyelenggaraan festival.



Geri (23 tahun) yang sehari-hari bekerja sebagai manol, berkata bahwa pesta *sound horeg* dan *lanyard* itu membuatnya berdaya. Dengan buku catatan di tangan, ia berkeliling dari rumah ke rumah menarik iuran, menyebut nama-nama donatur, mengatur arak-arakan, dan berbicara lebih tinggi di hadapan warga lain. Ada juga Tomi, yang juga seorang manol, mengenakan rompi oranye tanda bagian tim keamanan. Dia menempelkan stiker, menarik uang, dan mengarahkan ke mana pengunjung boleh melaju. Dia begitu lekat dengan identitasnya sebagai panitia *sound horeg* yang siap menghadirkan ambulans baru dari acara yang begitu dibanggakannya. “Keuntungan *sound horeg* ini akan digunakan untuk menambah ambulans desa lagi.” *Lanyard* dan rompi panitia menjadi tanda pengukuh status baru, memberinya izin sosial untuk memerintah, dan pendapatnya berhak diikuti. Dalam festival *sound horeg*, Geri dan Tomi tidak sekadar bekerja, melainkan memerankan kekuasaan dalam bentuk yang paling kecil, lengkap dengan gestur dan simboliknya.

Begitulah kuasa bekerja, hidup dalam penampilan bukan hanya dalam struktur. Dalam semesta *sound horeg*, kuasa dijalankan melalui perbedaan atribut, posisi, dan jarak. Panggung menjadi arena eksklusif tempat simbol kuasa dipertunjukkan, sementara kerumunan di bawahnya menjadi cermin yang mempertegas jarak kuasa tersebut. Mereka yang memegang mikrofon, menempati panggung kehormatan, dan mendapat sorotan lampu warna-warni adalah penguasa, sementara yang duduk di seberangnya dengan alas plastik adalah penonton. Kehadiran penonton, sebagai manifestasi wong cilik, sangat dibutuhkan agar kekuasaan itu menjadi tampak.

Gambar 5. Spanduk tagihan iuran *sound horeg* yang menandai retaknya semangat “guyub” di RT 07. Spanduk ini mencantumkan nama-nama warga beserta kekurangan pembayaran iuran, menampilkan secara publik siapa yang dianggap “patuh” dan “membangkang”. Dipasang hanya dua hari sebelum menuai protes, spanduk ini memanfaatkan rasa malu sebagai alat penertiban sosial, sebuah mekanisme yang mengungkap bagaimana kebersamaan bisa berubah menjadi tekanan.



TAGIHAN IURAN SOUND HOREG		
NAMA	TOTAL BAYAR	KURANG
Drupadi	Rp200.000	Rp300.000
Parikesit	Rp250.000	Rp250.000
Arjuna	Rp100.000	Rp400.000
Sengkuni	Rp450.000	Rp50.000
Durasana	Rp400.000	Rp100.000
Rahwana	Rp425.000	Rp75.000

"RT 07 ORA SOLID ORA KEPENAK"

Wong cilik yang menjadi penonton pun tidak pasif. Dalam lingkup ini, penonton mampu memilih untuk menjadi juri atas performa kuasa itu sendiri. Mereka menilai, membandingkan, bahkan memberi makna pada setiap rombongan *sound horeg*; sound mana yang paling *horeg*, lampu sorot mana yang variasinya paling gemerlap, atau sound mana yang biduannya paling bahenol. Dari tepuk tangan dan tatapan mereka, *feedback* terbentuk. Penilaian tersebut bahkan mampu membuat penguasa, seperti Geri dan Tomi, sesaat bergantung pada kawulanya. Ketika penonton bosan, kuasa dapat terancam pudar.

Festival *sound horeg* dengan demikian menghadirkan teater kekuasaan: mereka yang beratraksi di atas panggung dan mereka yang duduk menonton sama-sama memainkan perannya dalam sistem sosial yang saling membutuhkan. Kuasa dijalankan bukan melalui pemaksaan, melainkan melalui atraksi, kasak-kusuk, dan kerumunan. Kuasa ini tampil bukan sebagai wujud pengendalian hidup, tetapi sebagai drama sosial. Hal tersebut menjadi panggung manol untuk berlatih menjadi elite dan belajar mempertontonkan dirinya. Itulah inti dari kekuasaan, ia eksis sejauh ia ditonton.

Ngalih-Ngalah: Menjauh dari Panggung

Tidak setiap wong cilik dapat larut dalam kemeriahan *sound horeg*. Sejak awal, festival ini telah menjanjikan kegembiraan kolektif dan semangat guyub, kecuali segelintir warga yang menolak membayar iuran. Penolakan secara halus kerap dilakukan dengan memilih diam tanpa partisipasi yang sewajarnya. Beberapa warga bahkan diam-diam meninggalkan kampung sementara dengan dalih kerabat sakit, penugasan kerja, atau hajatan di kabupaten sebelah.

Gambar 6. Kaca rumah yang diselotip silang sebagai bentuk resistensi halus terhadap dentuman *sound horeg*. Pita lakban yang menahan getaran memberikan isyarat kecil untuk menunjukkan ketegangan yang tidak tersuarakan, suara penolakan yang tidak bisa diteriakkan, tetapi bisa ditempelkan pada jendela.



Di tepi jalan yang menjadi lintasan karnaval *sound horeg*, kami mengamati lakban merekat-silang di kaca-kaca jendela untuk mengurangi getaran dan mencegah pecah. Rumah-rumah itu tidak ada hiasan atau pernak-pernik kemeriahan, justru tampak menolak menjadi bagian dari euforia. Genteng-genteng dibiarkan meluncur dari tempatnya; rumah itu turut prihatin atas kelelahan penghuninya. Sementara itu, beberapa keluarga diam-diam telah mengungsi ke desa sebelah atau kabupaten tetangga dengan menumpang di rumah kerabat. Mereka berupaya menemukan kesempatan istirahat yang menenangkan. “Sudah sepuh, kasihan kalau jantung kumat,” keluh Ulfi yang menemani bapaknya ke desa sebelah. Ada pula Pardi, pemuda penting di karang taruna desa, yang minggat dari festival karena ada “penugasan kantor” ke luar kota. Ia sadar jika mengungkapkan keberatannya terhadap festival, ia akan menghadapi isolasi sosial. “Ini yang bikin berat tinggal di desa, mencolok kalau kita berbeda dari yang lain itu tidak mungkin.”

Tidak semua wong cilik yang tidak suka dengan *sound horeg* memiliki kemewahan untuk meninggalkan rumahnya. Selain karena tidak ada tempat untuk menginap selama beberapa hari, tidak mudah menemukan alasan masuk akal untuk pergi selama 2-3 hari. Bagi pemilik sapi, pergi berhari-hari berarti meninggalkan relasi dengan sapi untuk merumput, *ngombor* (memberi minum), dan memerah. Sementara untuk petani, mereka perlu merawat tanaman dan menjaganya dari tangan-tangan jahil saat festival berlangsung. Mereka yang hanya punya pilihan untuk tinggal menemukan cara dalam berkompromi dengan *sound horeg*. Pintu ditutup rapat, lampu rumah dimatikan, atau berdiam diri di dalam rumah yang jauh dari kata tenang untuk memejamkan mata. Orang-orang ini juga tidak ikut mengambil keuntungan dari festival, seperti menjajakan sempol, seblak, dan sate di depan rumah. Festival ini terlalu besar untuk dilawan, tetapi juga terlalu “licin” untuk diikuti. Mereka melawan tanpa menandingi gelegar *sound horeg* dengan *ngalah* (mengalah) dan *ngalih* (menepi), tanpa perlu *ngamuk* (konfrontasi).

Memilih pergi atau berdiam diri bukan berarti tanpa risiko sosial. Bagi masyarakat desa yang begitu menyanjung guyub, penyelenggaraan *sound horeg* mengandung harapan terhadap performasi kampung-kampung yang meriah dan kompak. Menolak partisipasi dapat dicurigai sebagai antikekompakan atau pro-individualis. Mereka yang dianggap tidak turut dalam menyemarakkan dapat dilabel sebagai pribadi yang sombong atau

tidak mau *srawung* (bersosialisasi). Meski demikian, kami melihat bahwa memilih untuk diam (ngalah) memiliki risiko yang paling minim, bahkan apabila dibandingkan dengan mengutarakan keberatan secara terbuka (konfrontasi). Terdapat cerita tragis dari Sarjiyem (35 tahun) yang pernah menyatakan keberatannya terhadap penyelenggaraan *sound horeg* melalui Facebook. Perempuan itu mendalilkan *sound horeg* dengan banjir mudarat dan setetes manfaat, yang kemudian menimbulkan kasak-kusuk seluruh desa. Tidak berhenti di situ, Sarjiyem mengalami pengucilan selama berbulan-bulan seolah ia tidak lagi memiliki tetangga. Tidak tahan, Sarjiyem dan keluarganya pindah ke desa lain. Cerita yang serupa terjadi pula di kabupaten sebelah, keluarga yang keberatan terhadap karnaval *sound horeg* nasibnya tragis. Rumahnya dikepung warga dengan moncong *sound horeg* yang menggelegar di depan rumah dengan volume maksimal (Perdana 2025).

Resistensi terhadap *sound horeg* perlu diolah menjadi tindakan yang tersembunyi dan nyaris tidak terucap. Mereka menyadari penolakan yang terucap dapat menghapus status sebagai warga baik dan guyub. Jalan sosial itu dinegosiasikan dengan, misalnya tidak membayar iuran penuh, tidak hadir, atau sekadar menutup pintu rumah. Perlawanan yang nyaris tidak terlihat ini justru menunjukkan ketajaman insting sosial. Di balik slogan gayeng dan meriah, terdapat kekuasaan yang membungkam, mempermalukan, mengejek, dan mengucilkan. Dalam konteks ini, gayeng bukan sekadar suasana pesta, melainkan instrumen kekuasaan yang mengarahkan setiap orang untuk menunjukkan kebersamaan dan harmoni. Melalui *sound horeg*, kekuasaan yang gayeng itu memperluas pengaruhnya hingga ke ruang moral sosial. Mereka yang diam dianggap dingin, yang tidak turut guyub dianggap tidak rukun, dan yang tidak ber-*horeg* dianggap sebagai amoral. Oleh sebab itu, resistensi terhadap *sound horeg* perlu penyamaran dengan tidak menjadi serigala berbulu domba, yaitu menghindar tanpa menolak dan menepi tanpa menantang. Dalam dentuman *sound horeg* yang tidak mungkin diredam, mereka memilih kesunyian sebagai upaya untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa kehilangan keanggotaan dalam komunitasnya.

Penjegal Moral: Kuasa Elite dan Wong Cilik

Di konteks pedesaan Jawa Timur, kekuasaan secara tradisional bermuara di ruang moral dan religi yang menata kehidupan sosial melalui kuasa tafsir moral (Ayuningtyas 2025; Subakir 2018). Kuasa ini tidak hanya bersandar pada legitimasi religi, tetapi juga pada penguasaan atas moral publik, termasuk bentuk kegembiraan yang dianggap layak. Akan tetapi, moralitas di sini bukan semata tentang sistem nilai, melainkan instrumen untuk mempertahankan kuasa dan posisi sosial.

Kami mengamati bahwa *sound horeg* tampil sebagai bentuk kuasa baru yang mengusik tatanan lama. Selain sebagai pesta bunyi, *sound horeg* merupakan medium sumber daya dan pengakuan sosial yang berpindah tangan dari para pemegang otoritas moral kepada kekuasaan bunyi. Aktor-aktor seperti *sound owner*, *sound engineer*, panitia, dan pemain festival adalah elite baru yang memperoleh kuasa bukan dari kitab atau khotbah, tetapi dari kemampuan menguasai dentuman dan memobilisasi kerumunan. *Sound horeg* dengan demikian beroperasi sebagai kanal wibawa baru, membangun legitimasi tandingan yang tidak lagi tunduk pada struktur moral lama. Maka dari itu, hal yang logis apabila kekuasaan tradisional menanggapinya dengan penjegal moral.

Gambar 7. Garis rafia bertuliskan “AREA STERIL” melingkari masjid sebagai batas simbolik kuasa moral tradisional. Penandaan ruang ini tidak hanya memisahkan wilayah sakral dari keramaian *sound horeg*, tetapi juga memvisualkan upaya elite moral mempertahankan otoritasnya. Termasuk klaim atas wilayah yang tidak boleh diganggu oleh dentuman, sekaligus pesan bahwa festival bunyi itu sedang mengusik tatanan moral yang lebih tua.

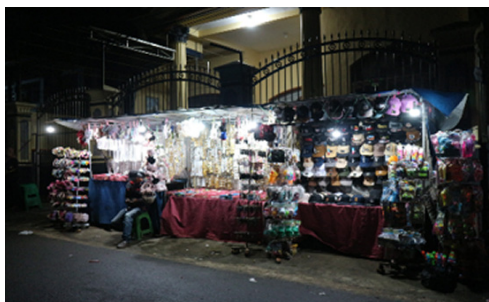


Pelarangan dan pembatasan terhadap *sound horeg*, misalnya oleh MUI Jawa Timur (Majelis Ulama Indonesia 2025), dapat dibaca sebagai reaksi terhadap munculnya kekuasaan baru yang tumbuh di luar arena kuasa tradisional. Dalih moralitas tidak lagi diterima sebagai urusan kesalehan, tetapi strategi mempertahankan dominasi. Strategi ini tampak melalui tulisan “AREA STERIL” yang dipasang di sekeliling area masjid selama festival berlangsung atau dalam khotbah-khotbah yang menegaskan bahwa euforia *sound horeg* adalah ladang maksiat dan tanda keruntuhan akhlak.

Kuasa Itu Bualan

Kuasa dalam *sound horeg* pada akhirnya adalah omong kosong yang nyaring. Semua janji yang digulirkan sejak awal tidak lebih dari sekadar fatamorgana. *Sound horeg* dibunyikan sebagai iming-iming, seolah menjadi jalan untuk kebersamaan dan keguyuban. Termasuk janji bahwa perhelatan ini akan membangun citra desa dan menggerakkan ekonominya. Janji itu berhenti bahkan sebelum volume *sound horeg* diturunkan atau dimatikan seluruhnya, janji yang menguap sebelum ornamen di panggung kehormatan dilucuti.

Gambar 8. Pedagang kaki lima yang sepi pembeli di tengah euforia *sound horeg*. Di balik janji panitia bahwa festival akan menggerakkan ekonomi desa, realitas ini memperlihatkan kebalikannya. Dagangan yang tidak tersentuh dan tatapan lelah pedagang menyingkap ilusi ekonomi yang dijanjikan. Ironisnya, ketika awalnya kami mengira pedagang sedang menyiapkan bahan dagangannya, mereka malah membereskan pulang.



Alih-alih menemukan deretan pedagang yang sibuk melayani pembeli, yang tampak justru pedagang sedang merapikan dagangannya: kacamata ditumpuk dalam wadah besar, listrik dimatikan, dan penjual cilok berpacu untuk pulang. “Tidak laku, Mas. Ini cuman dapat Rp7.000,” kata pedagang cilok itu. Pedagang kecil ini tampaknya menjadi korban atas janji penambahan ekonomi selama festival.

Bualan festival *sound horeg* tidak berhenti di pedagang kecil saja, *sound horeg* sudah menebar lebih banyak janji ke warga yang memanggilnya. Selain membual kepada pedagang, festival ini menjanjikan penyulapan uang tiket masuk dan jasa parkir untuk menambah ambulans desa, seperti tahun sebelumnya. Setiap motor dipungut Rp10.000 untuk akses parkir tiga hari. “Berapa saja yang didapat yang penting bisa membeli ambulans, seperti tahun lalu,” ujar salah satu petugas parkir dengan bangga. Usai rangkaian *sound horeg*, penghasilan kotor yang dilaporkan dari parkir hanya mencapai Rp73.000.000, berkurang jauh dari pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan ini menjadi kerdil di hadapan harga ambulans yang berkisar Rp201.000.000 sampai Rp400.000.000, belum lagi dengan dana miliaran hasil iuran untuk festival. Iuran yang dikumpulkan selama setahun telah berpindah ke dalam brankas *sound owner*.

Fadil, salah satu *sound owner* menceritakan bahwa pendapatan bersih yang diperoleh dalam satu tahun bisa lebih dari satu miliar.

“Kalau dihitung, satu miliar ada satu tahun kemarin. Studio ini hasil dari *sound horeg*, bahkan bisa untuk *update* alat-alat juga. Yang lain tidak terlalu saya hitung. Yang jelas alatnya bisa *upgrade* setiap tahun. *Upgrade* itu bisa separuh dari keuntungan kotor,” ujar Fadil.

Sekali turun panggung, Fadil bisa membawa pulang keuntungan Rp15.000.000 sampai Rp20.000.000 tergantung pada model yang diinginkan penyewa atau panitia festival. Ia bahkan menunjukkan 120 nama konsumen yang telah *booking* untuk tahun 2025, baik dari dalam maupun luar kabupaten. Melalui bisnis *horeg*, Fadil dan *sound owner* lain adalah kelas menengah baru. Mereka menguasai dan mendistribusikan dentuman sebagai komoditas baru, sementara manol masih mengharapkan adanya perbaikan hidup sembari menanti penyelenggaraan festival terdekat.

Gambar 9. Lahan parkir yang lengang dan ambulans desa yang dijanjikan namun tak kunjung terwujud. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika area parkir dipadati kendaraan, tahun ini pengunjung jauh lebih sedikit. Hal ini seolah menunjukkan realitas yang berbeda dengan semangat panitia parkir.



Kesimpulan

Pada akhirnya, *sound horeg* adalah miniatur negara yang tumbuh dari hasrat manol, representasi wong cilik untuk mencicipi sedikit kuasa. Seperti halnya negara yang mereka imitasi, kuasa yang dihidupi juga cepat berubah menjadi nafsu untuk mencaplok sesamanya. Begitu mikrofon dipegang atau kabel listrik dikuasai, pola lama pun berulang: memungut, memerintah, dan meminggirkan. Ironisnya, kuasa tidak menjelma menjadi alat pembebasan, tetapi cermin terbalik dari struktur yang menindas. Gelaran *sound horeg* pun menjadi ritual kuasa yang janggal; aturan, simbol, dan gengsi dikendalikan oleh kekuatan dentuman bas. Di balik gegap gempita itu, tidak ada yang benar-benar berdaulat, yang ada hanyalah reproduksi kuasa dalam bentuk yang lebih bisung. Di sinilah paradoksnya, pesta yang seharusnya menjadi ruang pelarian justru menjadi cara baru bagi wong cilik untuk menundukkan di bawah imaji kuasa yang mereka mainkan.

Sound horeg juga menyimpan bentuk sabotase yang halus. Dengan dentuman yang dapat menandingi pengeras suara mana pun, mereka seolah ingin membalas dunia yang terlalu lama membisukan mereka. Akan tetapi, perlawanan itu kehilangan orientasi terhadap kelas, berhenti pada euforia, bukan perubahan. Pendek kata, *sound horeg* berfungsi seperti obat penenang yang menyalurkan frustrasi, membius penderitaan menjadi hiburan, dan melupakan luka struktural untuk sementara. Pada akhirnya, *sound horeg* ini tidak ubahnya miniatur negara dan watak kuasa yang dimainkan pun tetap sama: mengontrol, menyisihkan, dan membual. Namun, kini kuasa itu hadir melalui resonansi yang lebih bisung.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Samingan yang telah menerima, menampung, dan mendampingi kami selama kerja lapangan di Kecamatan Untung. Dukungan dan keramahan mereka memungkinkan kami menjalin hubungan dengan para aktor festival serta para petani yang menjadi bagian penting dari penelitian ini. Penghargaan yang tinggi juga kami berikan kepada seluruh informan yang telah mengizinkan kami memasuki dunia mereka dengan berbagi pengalaman dan membuka ruang refleksi bagi kami.

Referensi

- Ayuningtyas, Vira. 2025. "Politik Dinasti Pemilihan Kepala Desa Randugede Kec. Plaosan Kab. Magetan Jawa Timur Perspektif Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Hukum Indonesia* 4(4): 160–184. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i4.1777>
- Chalik, Abdul. 2016. "Elite Lokal yang Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur". *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 23(2): 364. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.744>
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2025. "MUI Jatim Resmi Tetapkan Fatwa Sound horeg, Berikut Isi Fatwanya." muidigital, 15 Juli. <https://mui.or.id/baca/berita/mui-jatim-resmi-tetapkan-fatwa-sound-horeg-berikut-isi-fatwanya>
- Pradana, Mahatva. Y. A. 2019. "Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepuh Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang". *Jurnal Sosiologi Agama* 13(1): 181. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-07>
- Semedi, Pujo. 2020. "Sakpada-pada: Jalan Tengah Kesetaraan di Pedesaan Jawa, 1850 – 2010". *Jurnal Kawistara* 10(1): 1. <https://doi.org/10.22146/kawistara.52182>
- Subakir, Ahmad. 2018. *Relasi Kiai Dan Kekuasaan: Menguak Relasi Kiai dan Pemerintahan Daerah dalam Politik Lokal*. STAIN Kediri Press.